

**UPAYA PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA DALAM
MENGHADAPI *FREE FLOW LABOUR SKILLED* PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN : STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS¹**

Tundjung Linggarwati ²

Renny Miryanti ³

Abstract

The world will coming to the liberalization of flow of information, goods, capital, and labour. Information will travel everywhere without any borders. Goods will go to where they are best sold. Capital will flow to where its rate of return is the highest. Labour will work where he/she gets the most desirable (financial and non-financial) job. If ASEAN Free Trade Area is successful in liberating trade and investments, the next step would be the effort to liberate the labour flow; skilled labour or unskilled labour. This article attempts to describe the condition of labour force in Banyumas Region in Central Java Province, and the effort of the Local Government of Banyumas Region in increasing the quality of labour forces in facing free flow skilled labour of ASEAN Free Trade Area especially ASEAN Economic Community 2015.

Keywords : Free Flow Skilled Labour, Employment quality, ASEAN Free Trade

Abstrak

Dunia akan datang ke liberalisasi arus informasi, barang, modal, dan tenaga kerja. Informasi akan bepergian di mana-mana tanpa batas. Barang akan pergi ke mana mereka adalah yang terbaik dijual. Modal akan mengalir ke mana laju pengembalian tertinggi. Buruh akan bekerja di mana ia mendapatkan pekerjaan (keuangan dan non-keuangan) yang paling diinginkan. Jika Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN berhasil dalam perdagangan dan investasi membebaskan, langkah berikutnya akan menjadi upaya untuk membebaskan aliran kerja; tenaga kerja terampil atau tenaga kerja tidak terampil. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja di Daerah Banyumas Propinsi Jawa Tengah, dan upaya dari Pemerintah Daerah Banyumas dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja dalam menghadapi aliran bebas tenaga kerja terampil ASEAN Free Trade Area terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Kata Kunci: Arus Gratis Terampil Buruh, kualitas Ketenagakerjaan, Perdagangan Bebas ASEAN

¹ Tulisan ini merupakan hasil Penelitian yang dilaksanakan atas biaya Hibah Kompetitif Penelitian Pemula Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011

² Staf Pengajar Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

³ Staf Pengajar Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

LATAR BELAKANG

Sejak berakhirnya perang dingin, yang menyisakan Amerika Serikat sebagai adidaya tunggal, orientasi kepentingan negara-negara di dunia telah berubah. Preferensi kepentingan politik telah bergeser menjadi kepentingan ekonomi yang mengambil bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi menjadi jargon yang amat populer yang mewakili paradigma perekonomian dunia yang terbuka dan menjadi topik yang banyak diperbincangkan dalam dua dekade terakhir, umumnya secara antusias dan bersemangat, namun kadang dibayangi oleh kekhawatiran dan kekecewaan.

Perkembangan dunia internasional yang diwarnai dengan fenomena tata perekonomian dunia baru yang menjurus pada liberalisasi perekonomian menjadi tidak terelakkan. Berbagai perjanjian internasional di bidang liberalisasi perdagangan bermunculan. Indonesia pun harus mengikuti arus liberalisasi meski berbagai kalangan dalam negeri meminta untuk menundanya. Hal ini merupakan konsekuensi bagi perekonomian negara yang menganut pasar bebas. Paham yang punya ciri antara lain: kebebasan arus modal, barang, dan jasa; dan persamaan perlakuan dan kesempatan bagi pelaku usaha dari seluruh negara peserta. Apalagi, Indonesia telah meratifikasi berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-undang No.7/1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Artinya, Indonesia telah resmi menjadi anggota WTO, dan oleh sebab itu terikat secara hukum dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati. Untuk itu, Indonesia harus pandai-pandai menciptakan peluang di tengah-tengah percaturan global. Jika tidak, kondisi ekonomi dalam negeri bisa terancam dan Indonesia tidak mampu bersaing secara kompetitif dengan negara-negara lain dalam era perdagangan bebas.

Gejala lain yang berkembang dalam liberalisasi dan integrasi ekonomi dunia adalah munculnya sejumlah regionalisme. Beberapa negara yang terletak pada kawasan tertentu bersekutu. Mereka membentuk komunitas terpadu dalam blok-blok perdagangan secara bilateral, regional atau multilateral dengan menghapus seluruh hambatan bagi arus modal, barang atau jasa. Menurut laporan WTO, hingga tahun 2006 terdapat sekitar 200 perjanjian ekonomi regional di seluruh dunia yang berjalan efektif, dan masih ada sejumlah lagi yang masih berada dalam taraf negosiasi. Volume perdagangan antar negara yang terlibat dalam perjanjian ekonomi regional sekarang telah melebihi separuh dari

total perdagangan global, meningkat dari hanya sekitar 20% pada tahun 1960. Perjanjian ekonomi regional yang terbesar sampai saat ini adalah North American Free Trade Area (NAFTA) dan European Community (EC).⁴

Di lingkup Asia Tenggara, globalisasi, yang tidak lain berarti integrasi ekonomi secara menyeluruh, telah menampakkan bentuknya di mata negara-negara ASEAN dalam bentuk *ASEAN Economic Community* (AEC) yang merupakan salah satu pilar dari *ASEAN Community*.⁵ Era pasar bebas regional mulai berjalan. Pada Januari 1992, negara anggota ASEAN menandatangani sebuah deklarasi, yang menandai kesepakatan bersama untuk menggalang kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Inti deklarasi itu adalah kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dalam kurun waktu 15 tahun.

Sebuah perdagangan bebas ASEAN, artinya penghapusan hambatan-hambatan perdagangan antar negara untuk membentuk pasar yang lebih bebas diantara sesama negara anggota. Didalamnya, termasuk penurunan tarif bea masuk atas barang-barang yang diperlukan, dan penghapusan pembatasan kuota, serta penghapusan hambatan non-tarif lainnya, yang dapat membatasi arus barang impor. Pada saat yang sama, masing-masing negara masih diperbolehkan untuk mengatur sendiri tarif bea masuk impor dari negara non-ASEAN. Dengan derajat kesiapan masing-masing, pada tahap pertama di tahun 2010, Indonesia bersama lima negara anggota ASEAN lainnya: Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand telah bersama-sama dalam pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area* - AFTA). Pada tahap kedua tahun 2015, AFTA melibatkan anggota lain, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, dengan mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing dan keikutsertaan mereka sebagai anggota ASEAN yang diresmikan belakangan. Negara-negara ASEAN merealisasikan kawasan perdagangan bebas dengan Cina untuk ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam) dan 2015 untuk Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Kesepakatan perdagangan bebas yang secara berangsur ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia, sejak Orde Baru hingga pemerintahan

⁴ "WTO News & Views", July-September 2006, Vol. 2 No.3 dalam Bank Indonesia, 2008. *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. "Outlook Ekonomi Indonesia: Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional". Edisi Januari 2008. Bank Indonesia. Jakarta

⁵ *ASEAN Economic Community* merupakan salah satu pilar utama dalam *ASEAN Community* disamping *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio Cultural Community* (ASCC)

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akan mengakibatkan terjadinya arus perpindahan tenaga kerja antar negara secara bebas. Ancaman bagi para tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) di negara-negara sedang berkembang adalah masuknya pesaing-pesaing baru dari negara-negara maju, sedangkan ancaman bagi tenaga kerja kurang terdidik di negara-negara maju adalah masuknya pesaing-pesaing baru dalam skala besar dari negara berkembang.

Liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, investasi, dan mobilitas faktor produksi tenaga kerja tidak hanya berimplikasi pada pergerakan barang, jasa dan investasi, tapi juga akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, akan terjadi pergerakan manusia antarnegara (*borderless labour*) yang memicu terjadinya migrasi pekerja dari luar ke negara tersebut atau sebaliknya. Dampak pada kondisi ketenagakerjaan ini biasanya menjadi isu yang paling sensitif dalam pembentukan suatu kawasan integrasi ekonomi, seperti yang misalnya dialami oleh Uni Eropa.

Secara teoritis, liberalisasi dalam keempat faktor di atas akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena akan menciptakan kondisi yang mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sumber-sumberdaya secara lebih efisien (dampak alokasi). Dihapusnya hambatan dalam mobilitas tenaga kerja akan membuka kesempatan pada para pekerja untuk mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Di sisi lain, pengusaha juga memperoleh kesempatan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dianggap paling cocok. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan selanjutnya juga menaikkan upah tenaga kerja.⁶ Kesepakatan perdagangan bebas juga membuka peluang buruh Indonesia untuk leluasa bekerja di luar negeri. Sebab, kesepakatan itu harusnya juga meniadakan hambatan arus tenaga kerja antarnegara. Artinya, tenaga kerja kita bebas mencari kerja ke negara-negara yang memiliki upah lebih tinggi atau sebaliknya masuknya pesaing-pesaing baru dari negara-negara lain.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.02/MEN/III tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan akan membatasi jumlah tenaga kerja asing di Indonesia

⁶ Bank Indonesia, 2008. *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. "Outlook Ekonomi Indonesia: Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional". Edisi Januari 2008. Bank Indonesia. Jakarta. Hal.31

terkait dengan penerapan kawasan perdagangan bebas China-ASEAN. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki sponsor.⁷ Namun upaya melindungi tenaga kerja dalam negeri bukan hanya dengan pembatasan, karena seiring liberalisasi perdagangan yang menuntut aliran bebas tenaga kerja (*free flow skilled labour*), Indonesia tidak selamanya mampu melakukan kebijakan “pintu tertutup” terkait hal tersebut, namun upaya yang terpenting adalah upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau tenaga kerja terampil (*skilled labour*) secara berkelanjutan agar memiliki daya tawar dan daya saing di tengah arus perdagangan bebas ASEAN dan negara-negara lainnya.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki kekayaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) cukup melimpah. Namun sayangnya, semua faktor *endowment* tersebut belum termanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif. Sehingga sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan dibandingkan dengan tingkat kehidupan rakyat di beberapa negara lain. Hal ini terlihat berdasarkan laporan *United Nations Development Program* (UNDP) mengenai *Human Development Index* (HDI), dimana Singapura mengungguli 9 anggota ASEAN lainnya dengan menempati urutan 25 dari 177 negara, sedangkan Myanmar menempati urutan 132. Posisi Indonesia sendiri tidak terlalu menggembirakan, hanya lebih baik dibandingkan Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kondisi ini sejalan dengan beberapa data SDM lainnya seperti tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah, serta rendahnya pengeluaran porsi belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan.⁸

Berdasarkan peringkat daya saing negara yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) memperlihatkan betapa Indonesia nampaknya masih memiliki masalah dalam hal pemenuhan beberapa persyaratan mendasar bagi terciptanya keunggulan yang tinggi dalam menghadapi perdagangan bebas, seperti kondisi infrastruktur, kelembagaan, dan sumberdaya manusia. Posisi Indonesia relatif tidak begitu baik dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, dan Thailand). Tingkat penguasaan teknologi Indonesia nampaknya juga cukup tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya

⁷ Sambutan tertulis Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, pada seminar “Strategi Ketenagakerjaan Terkait Pasar Bebas China-ASEAN 2010” di Universitas Diponegoro Semarang. Dimuat di www.antarane.ws.com

⁸ UNDP, 2007, *Human Development Report*

seperti terlihat dari tingkat penggunaan telpon, internet, maupun konsumsi listrik.⁹ Agar bisa bangkit dari kondisi tersebut sehingga mampu menuai manfaat optimal dari integrasi ekonomi, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas faktor produksinya, baik berupa kapital fisik (*physical capital*) maupun sumberdaya manusia (*human capital*) sebagai faktor yang sangat mendasar. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk bekerja keras, terutama dengan kondisi perdagangan bebas ASEAN saat ini yang semakin membuat perekonomian lintas negara ASEAN dalam situasi saling ketergantungan yang semakin kuat dan sarat dengan persaingan. Perlu pembenahan dan persiapan di berbagai bidang terutama dalam hal sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan.

Perkembangan perdagangan bebas ASEAN pada dasarnya bisa dipandang sebagai suatu tantangan karena kita harus berhadapan dengan negara lain yang mungkin sudah jauh lebih siap untuk bersaing. Namun di sudut pandang yang lain juga terbuka peluang dan kesempatan untuk memperoleh berbagai keuntungan.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut dalam menghadapi era keterbukaan kesiapan sumberdaya manusia adalah faktor utama karena ini telah menjadi ciri abad 21 serta sekaligus merupakan motor dan titik sentral pembangunan. Potensi sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi akan mampu menggerakkan pembangunan jauh lebih baik walaupun sumberdaya alam tidak memadai atau tidak dipunyai sama sekali. Negara-negara industri baru seperti Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan telah membuktikan hal itu. Jepang yang porak poranda setelah perang dunia II dan tidak mempunyai sumberdaya alam, mampu bangkit dan kemudian berubah menjadi raksasa ekonomi dunia.¹⁰

Pengembangan kualitas angkatan kerja terasa semakin penting mengingat faktor tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk dapat tampil sebagai suatu negara maju. Sumberdaya manusia telah terbukti menjadi faktor utama penggerak pembangunan dan sumber ekonomi paling penting, sebab manusia dengan sumberdaya yang dimilikinya, mampu mengubah benda, ide, dan fantasi menjadi barang dan jasa yang berguna, bahkan merupakan jaminan terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi perlu disadari bahwa

⁹ World Economic Forum (WEF), 2007, *Global Competitiveness Report*, 2007

¹⁰ *Ibid*, Hal. 253

sumberdaya manusia yang akan mengambil peran aktif secara positif dalam pembangunan adalah manusia yang berkualitas baik. Sedangkan sumberdaya manusia yang berkualitas rendah justru sering menjadi sumber permasalahan dan beban bagi suatu bangsa. Hanya saja pekerjaan membentuk manusia yang bermutu dalam jumlah yang tepat bukanlah hal yang sederhana, karena usaha tersebut membutuhkan waktu yang relatif panjang dan dana yang cukup besar. Proses pembentukan sumberdaya yang berkualitas adalah harus dimulai semenjak usia dini dengan penekanan pada aspek kesehatan dan pemenuhan gizi, kemudian dilanjutkan dengan penggodokan melalui pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan.¹¹ Gambaran kondisi SDM Indonesia yang tidak terlalu menggembirakan menyebabkan pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan dalam kualitas SDM.

Era Perdagangan bebas yang berlangsung di wilayah regional negara-negara ASEAN tidak hanya berimplikasi di level nasional, daerah sebagai bagian dari sebuah pemerintahan negara jelas akan ikut merasakan dampaknya, karena kebijakan-kebijakan internasional yang telah dikeluarkan oleh sebuah negara tentu akan berimplikasi dari level propinsi hingga level daerah, begitu pula halnya dengan Kabupaten Banyumas yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, salah satu propinsi di Indonesia. Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari Republik Indonesia sudah pasti akan ikut merasakan dampak dari *free flow skilled labour* sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kondisi angkatan kerja Kabupaten Banyumas dalam menghadapi *free flow of labour skilled* pasar bebas ASEAN dan upaya pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja di Kabupaten Banyumas dalam menghadapi *free flow of skilled labour* perdagangan bebas ASEAN.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan (investasi) sumberdaya manusia dengan empat aspek utama yaitu kesempatan

¹¹ Soekarni, Muhammad, 2001. *Kondisi Angkatan Kerja Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi* dalam Thoha, Mahmud (ed.), 2001. *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E – LIPI). Jakarta. Hal. 252

kerja, tingkat pendidikan, pengangguran dan migrasi. Penelitian ini juga menggunakan konsep *ASEAN Community* terutama dengan titik tekan *ASEAN Economic Community 2015* dan integrasi ekonomi untuk meneliti lebih lanjut *free flow of skilled labour* perdagangan bebas ASEAN yang akan dihadapi Indonesia secara umum dan daerah secara khusus, dalam hal ini Kabupaten Banyumas yang terletak di Propinsi Jawa Tengah.

KERANGKA KONSEP

1. Integrasi Ekonomi

Perdagangan internasional telah cukup lama menjadi salah satu subjek yang banyak menyita perhatian dalam perkembangan teori ekonomi. Beberapa ekonom yang mendalami masalah ini diantaranya adalah David Ricardo, yang terkenal dengan teori keunggulan komparasi (Ricardian Model) dan Heckscher-Ohlin dengan Heckscher-Ohlin Model yang mengedepankan perbedaan sumberdaya sebagai faktor pendorong terciptanya perdagangan antar-negara. Meskipun demikian, kajian tentang integrasi ekonomi secara khusus dipelopori oleh Viner (1950).¹² Oleh Viner, dampak dari suatu integrasi ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan dijelaskan melalui konsep *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* terjadi apabila suatu negara dapat mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain dalam suatu kawasan integrasi ekonomi, sehingga secara keseluruhan kesejahteraan akan meningkat. Sementara itu, *trade diversion* terjadi apabila impor dari suatu negara yang berada di luar kawasan digantikan oleh negara lain yang berada dalam kawasan integrasi, karena produk dari negara lain dalam kawasan tersebut menjadi lebih murah akibat adanya perlakuan khusus dalam penetapan tarif.¹³

Bentuk kerjasama regional bervariasi menurut perbedaan tingkat integrasi ekonomi yang dilakukan. *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan tahapan paling awal dari proses integrasi ekonomi. Dalam FTA, negara peserta bersepakat untuk menurunkan atau menghilangkan hambatan dalam perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, namun tetap dibebaskan menetapkan tarif perdagangannya sendiri terhadap negara bukan peserta FTA. Tahapan berikutnya dalam proses integrasi ekonomi adalah *Customs Union* (CU). Dalam CU, selain penetapan tarif preferential bagi sesama peserta, semua peserta juga

¹² Viner, J. 1950. *The Custom Union Issue*. Carnegie Endowment for International Peace. New York

¹³ Bank Indonesia, *Op. Cit.* Hal 25-26

menetapkan tarif impor yang sama terhadap negara non-anggota. Tahapan integrasi berikutnya adalah *Common Markets* (CM) atau pasar bersama. Dalam CM, negara peserta bersepakat mencabut semua penghalang dalam mobilitas kapital dan tenaga kerja serta melakukan harmonisasi dalam peraturan dan hukum. Contoh CM yang cukup signifikan adalah Mercosur di Amerika Latin, yang antara lain melibatkan Brasil dan Argentina. Kerjasama regional yang paling komprehensif adalah *Economic Union* (EU), dimana negara peserta tidak saja bersepakat dalam menghilangkan semua hambatan perdagangan dan menjamin kebebasan mobilitas semua faktor produksi, namun juga sampai pada penyatuan kebijakan moneter dan fiskal. Contoh dari EU adalah Uni Eropa.¹⁴

Manfaat yang ingin dicapai dari integrasi suatu kawasan tentu tidak hanya terbatas di sektor perdagangan saja. Harapan yang muncul dengan adanya EAC adalah bahwa dengan menggalakkan perdagangan intra regional dapat membantu meningkatkan kinerja pertumbuhan dari negara-negara anggota. Ekspansi perdagangan yang mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dapat membantu negara-negara yang kurang maju di ASEAN untuk mengejar ekonomi-ekonomi yang lebih maju di kawasan. Seperti yang dijumpai dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community* - EEC), terdapat tendensi terjadinya konvergensi pendapatan, bukan divergensi, diantara ekonomi yang menyatu melalui perdagangan internasional (Ben-David, 2000).¹⁵

2. ASEAN Community

ASEAN Community adalah merupakan kelanjutan dan percepatan dari *Vision 2020* yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN yakni:

*“...as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace stability and prosperity, banded together in partnership in dynamic development an in community of caring societies”.*¹⁶

Istilah *ASEAN Community* diadopsi melalui *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali, *concord II*), Bali, Oktober 2003 yang pada awalnya direncanakan akan tercapai pada tahun 2020. Sedangkan ide *ASEAN Community* sendiri diadopsi dari apa yang terjadi di Eropa dengan *European Union* atau Uni Eropa.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*. Hal 27

¹⁶ www.aseansec.org

Di dalam *ASEAN Community* terdapat tiga pilar utama, yakni: *ASEAN Security Community (ASC)* atau Masyarakat Keamanan ASEAN, *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN serta *ASEAN Socio Cultural Community (ASCC)* atau Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

a. *ASEAN Economic Community 2015*

Dalam *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012* Bank Indonesia (2008) dijelaskan ASEAN pada dasarnya adalah perluasan dari integrasi ekonomi regional yang telah dimulai beberapa tahun silam, tepatnya pada saat pembentukan AFTA tahun 1992. Kerangka besar dari integrasi ekonomi regional kemudian dirumuskan pada ASEAN Summit tahun 1997 di Kuala Lumpur yang menghasilkan Visi ASEAN 2020, yaitu: tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam ASEAN Summit di Bali tahun 2003, ditetapkan 3 (tiga) pilar guna merealisasikan visi ASEAN tersebut yaitu: *ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community*. Pertemuan juga menyepakati AEC paling lambat sudah terwujud pada 2020. Beberapa pertemuan setelah itu selanjutnya mulai membahas draft *blueprint* AEC yang memuat karakteristik, elemen, rencana aksi prioritas, target dan jadwal pencapaian AEC dengan 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1) *Single market and production base, yang meliputi:*

- *Free flow of goods*
- *Free flow of services*
- *Free flow of investment*
- *Free flow of skilled labour*
- *Free flow of capital*
- *Priority Integration Sectors, and food, agriculture and forestry.*

2) *Competitive economic region, yang meliputi: competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), infrastructure development, energy, taxation, e-commerce.* 3) *Equitable economic development, yang meliputi: SME development, initiative for ASEAN integration.* 4) *Full integration into global*

*economy, yang meliputi: coherent approach toward external economic relations, enhanced participation in global supply networks.*¹⁷

Selanjutnya, dalam *ASEAN Summit* pada bulan Januari 2007 telah disepakati untuk mempercepat pembentukan AEC dari 2020 menjadi 2015. Beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN untuk barang konsumsi hingga 20 persen sebagai dampak integrasi ekonomi,¹⁸ (ii) peningkatan kemampuan kawasan dengan adanya implementasi standar dan praktek internasional serta penerapan *intellectual property rights* (iii) peningkatan kualitas infrastruktur kawasan seiring dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi (iv) peningkatan manfaat bagi sektor swasta ASEAN. Pada *ASEAN Summit* November 2007, draft cetak biru *ASEAN Community* akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh semua Kepala Negara ASEAN.¹⁹

Pencapaian keempat pilar dalam AEC akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus saat ini pada pencapaian pilar pertama, yaitu terciptanya liberalisasi di perdagangan barang, jasa, dan investasi. Tercapainya pilar pertama akan menjadi dasar menuju pencapaian pilar-pilar selanjutnya, sehingga pada akhirnya ASEAN akan siap untuk sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global. Harapan bahwa pada akhirnya dapat sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global sekaligus menunjukkan keyakinan ASEAN bahwa kerjasama regional dalam AEC merupakan “*building blocks*” menuju tercapainya perdagangan bebas multilateral. Kerjasama regional yang dilakukan akan mendorong terciptanya keunggulan komparatif bagi kawasan secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya akan memperbesar kesempatan masing-masing negara dalam persaingan global.²⁰

b. Aliran Bebas Tenaga Kerja atau *Free Flow of Skilled Labour*

Aliran bebas tenaga kerja merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, sehingga kawasan ASEAN dapat membentuk jaringan produksi regional sebagai bagian dari rantai pasokan dunia. Aliran *Free flow of skilled labour* berarti dihapusnya

¹⁷ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Scorecard*, Edisi Maret 2010. “Charting Progress Towards Regional Economic Integration”. Publikasi ASEAN Secretariat. Jakarta

¹⁸ Studi oleh A McKinsey & Company, 23 Januari 2007. *An ASEAN Economic Community by 2015*. Publikasi ASEAN Secretariat. Jakarta

¹⁹ Bank Indonesia. *Op. Cit.* Hal.21

²⁰ Soesastro, Hadi, 2004. *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi, dan Semua Itu*, CSIS Working Paper Series Maret 2004.

hambatan dalam mobilitas tenaga kerja antarnegara, sehingga akan membuka kesempatan pada para pekerja dari sesama negara ASEAN untuk mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Dalam *Blueprint AEC 2015 skilled labour* didefinisikan sebagai berikut:

1) Pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidang pekerjaannya; 2) Lulusan Universitas, akademi, sekolah teknik, atau keahlian yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari.

Adapun langkah-langkah terkait dengan mobilitas faktor produksi tenaga kerja dalam *Blueprint AEC 2015* secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan mobilitas atau fasilitas masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu pekerja bagi tenaga profesional ASEAN dan tenaga kerja terampil.
- b. Untuk memudahkan arus bebas jasa-jasa pada 2015, ASEAN melakukan upaya harmonisasi dan standardisasi melalui:
 - Kerja sama diantara anggota *ASEAN University Network* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan staf jajarannya.
 - Penyusunan *indeks core competencies* (sesuai dengan keahlian dan kualifikasi) untuk pekerjaan dan *trainers skills* di sektor jasa prioritas (2009) dan sektor jasa lainnya (2010-2015).
 - Memperkuat riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Dalam studi literatur, data primer berasal dari sumber-sumber resmi pemerintah. Sedangkan data sekunder berasal dari analisis para praktisi dan akademisi yang terdapat di jurnal, buku, maupun tulisan-tulisan di media massa lainnya.

Kegiatan wawancara dilakukan ke beberapa narasumber yang berasal dari instansi pemerintah, misalnya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Balai Latihan Kerja Kabupaten

²¹ Bank Indonesia. *Op Cit.* Hal. 22

Banyumas, Lembaga Pelatihan Kerja serta Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia cabang Kabupaten Banyumas.

FREE FLOW SKILLED LABOUR SEBAGAI SALAH SATU AGENDA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai Sebuah Investasi

Konferensi *International Labour Organization* atau Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Geneva, Swiss pada 29 Mei – 15 Juni 2000 menyimpulkan bahwa pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan dan latihan merupakan bagian penting untuk mendapatkan keuntungan atas peluang dan tantangan globalisasi, dalam hal ini perdagangan bebas sebagai bentuk globalisasi ekonomi. Komponen globalisasi dan makin terintegrasinya kegiatan ekonomi dunia dari perubahan teknologi, perubahan pasar uang seiring munculnya pasar global barang dan jasa, persaingan internasional, peningkatan secara dramatis dalam penanaman modal asing (FDI), strategi bisnis, organisasi dan praktek manajemen baru. Bagi sebagian pekerja, perubahan-perubahan tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan karir dan kesempatan kerja, memperbaiki standar kehidupan dan harapan. Tetapi bagi sebagian lainnya bisa pula berakibat kehilangan pekerjaan, penurunan standar kehidupan dan kemiskinan. Perkembangan ini benar-benar telah meningkatkan pentingnya penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam aktivitas ekonomi.

Era globalisasi adalah era keterbukaan. Era keterbukaan berarti era pasar. Hemmer dalam bukunya menyebutkan bahwa ekonomi bangsa yang terbuka pada umumnya tumbuh lebih cepat dari ekonomi bangsa yang tertutup, karena peningkatan produktivitas dan investasi yang didorong oleh perdagangan. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal sumberdaya manusia dan akses lebih mudah terhadap masukan dari luar negeri dan pengetahuan internasional. Disini terdapat pengecualian bagi negara-negara yang umumnya kaya sumberdaya, yang akibat mengeksport barang primer yang miskin teknologi hanya mengalami sedikit saja peningkatan modal manusia, dimana negara-negara semacam itu sangat peka terhadap perubahan harga bahan baku akibat kurangnya diversifikasi produk mereka. Dampak distribusi yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan di negara-negara berkembang dalam jangka pendek

adalah peningkatan pendapatan²² sebagai akibat terjadinya spesialisasi ke arah produksi barang padat karya. Sedangkan dalam jangka menengah maupun panjang negara-negara tersebut juga akan mengatakan penurunan tenaga kerja tidak terampil akibat kemajuan internasional, sama seperti negara-negara industri.

Ide tentang investasi pada sumberdaya manusia sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama oleh Adam Smith melalui tulisannya yang terkenal *The Wealth of Nation*. Akan tetapi baru pada tahun 1950-an, para ahli ekonomi kembali mengkaji peranan sumberdaya manusia dalam suatu proses produksi.²³ Pada tahun 1959, H.W. Singer yang menulis tentang perkembangan ekonomi, mengatakan keberadaan faktor manusia dianggap sebagai faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. pada awal tahun 1960-an beberapa ahli seperti Fabrican, Solow, Kendrick dan Danison, mulai melakukan Penelitian tentang sumberdaya manusia ini, dan memperoleh hasil yang menunjukkan kaitan positif antara pendidikan penduduk dengan kemajuan ekonomi sebagaimana H.W Arndt yang dikutip oleh Prijono Tjiptoherijanto dalam EKI Vol. XLIV No.3 1996.

Demikian pula halnya Becker (1975) yang dalam penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara pendidikan dan penghasilan. Temuan-temuan tersebut kemudian mempengaruhi perencanaan kebijakan dan tidak terkecuali para penyandang dana internasional seperti Bank Dunia. Saat itu mulailah dilakukan investasi sumberdaya manusia melalui pendidikan. Sedangkan di negara-negara Asia Timur perhatiannya terhadap paradigma baru yang menekankan faktor lain yang lebih penting dari akumulasi fisik yaitu akumulasi modal sumberdaya manusia, mulai dilakukan pada sekitar tahun 1970-an. Pada kenyataannya di kebanyakan negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya juga dilakukan investasi pendidikan sebagai cara yang tepat sebagaimana Tirtosudarmo yang dikutip oleh M. Sukarni dalam tulisannya mengenai kondisi angkatan kerja Indonesia dalam menghadapi globalisasi dalam buku *Globalisasi krisis ekonomi dan kebangkitan ekonomi kerakyatan*, P2E-LIPI (2001).

²² Perkembangan ini diterangkan oleh teori perdagangan luar negeri neo klasik dalam rangka teorema proporsional faktor. Menurut teorema ini, suatu negara mempunyai keunggulan produksi produk tertentu, kalau dengan sangat intensif memanfaatkan faktor yang dimiliki negara tersebut secara relatif melimpah. Pada kasus negara-negara berkembang ini adalah barang-barang yang intensitas sumberdayanya tinggi dan padat karya. Melalui spesialisasi kepada barang padat karya timbul peningkatan kebutuhan tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan upah.

²³ Sukardi. *Op. Cit.* Hal. 255

Komitmen yang besar pada pendidikan mendapatkan porsi yang besar dalam “teori pertumbuhan *endogen*” yang dapat dipakai untuk menerangkan kemajuan yang besar yang dicapai negara-negara Asia Timur. Kemajuan yang dicapai negara Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan adalah akumulasi peningkatan sumberdaya manusia terutama melalui pendidikan formal di sekolah maupun informal melalui pelatihan di lapangan pekerjaan.

Bila dikaitkan dengan era perdagangan bebas, Prijono (EKI Vol.XLIV No.3, 1996: 233) menerangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diperlukan dalam rangka menghasilkan barang/jasa yang terbaik untuk kemudian dijual dalam iklim perdagangan yang bebas dan terbuka. Dalam menghasilkan produk yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sumberdaya pekerja yang dimiliki, kondisi lingkungan kerja dan efisiensi perusahaan. Ketiga faktor tersebut saling terkait. Namun kalau diperhatikan semua faktor tersebut menuju pada satu arah, yaitu pentingnya faktor sumberdaya pekerja dalam menggerakkan perusahaan. Peran sumberdaya manusia tidak semata terbatas pada lapisan bawah, namun mencakup semua lapisan mulai dari buruh (*blue collar worker*) sampai pada tingkat manajer (*white collar worker*).²⁴

Salah satu kebijakan yang perlu diambil dalam rangka kesiapan menghadapi globalisasi adalah kebijakan pendidikan yang efisien dan disesuaikan dengan kebutuhan bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Terutama ketersediaan modal sumberdaya manusia sangat menentukan bagi kemampuan suatu negara untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan mengadopsi pengetahuan negara lain, serta untuk melakukan diversifikasi produksi dan ekspor. Penelitian pertumbuhan ekonomi saat ini meletakkan modal sumberdaya manusia dan pengetahuan sebagai tema-tema sentral penentu pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dengan keberhasilan pendidikan diharapkan kualitas sumberdaya manusia pada umumnya dan angkatan kerja khususnya akan meningkat. Kebijakan pendidikan juga sangat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena banyak orang miskin hanya mampu meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan modal sumberdaya manusia yang mereka miliki. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang seluas-luasnya

²⁴ M. Soekarni, “Kondisi Angkatan Kerja Indonesia Menghadapi Globalisasi” dalam Mahmud Toha (ed), *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, 2001, P2E LIPI, Jakarta

berperan serta mengurangi kemiskinan dan terwujudnya pemerataan pendapatan. Rendahnya modal sumberdaya manusia merupakan penghalang pembangunan utama di kebanyakan negara berkembang. Oleh karena itu pengembangan sumberdaya manusia merupakan prioritas utama selain pembangunan infrastruktur.

Teori investasi sumberdaya manusia pada dasarnya mempercayai bahwa penghasilan seumur hidup dari mereka yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih besar daripada penghasilan seumur hidup mereka yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah, kendati biaya langsung dan biaya tidak langsung dari pendidikan yang juga lebih tinggi sudah diperhitungkan. Pendidikan tidak hanya dipetik oleh orang yang mendapatkan pendidikan sendiri (*private rate of return*) melainkan juga oleh masyarakat luas (*social rate of return*).²⁵

Pengembangan sumberdaya manusia itu menurut Elfindri (2001) dalam bukunya *Ekonomi Sumberdaya Manusia* dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan baik oleh individu, rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.²⁶

Upaya pengembangan sumberdaya manusia bagi Indonesia sangat penting artinya untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut Sri Mulyani dan Ninasapti (1995) secara umum tantangan sumberdaya manusia dapat dikategorikan dalam dua sumber. *Pertama*, tantangan dari dalam (domestik) terjadi karena transformasi perkembangan ekonomi dalam negeri yang telah mengubah wajah perekonomian dalam dominasi negara agraris menjadi secara perlahan menuju pada struktur negara industri (baru).²⁷

Kedua, tantangan yang berasal dari luar yang diakibatkan makin kuatnya arus globalisasi yang akan meningkatkan mobilitas arus sumberdaya manusia antarnegara. Arus perdagangan dan investasi antarnegara semakin marak dengan terbukanya hubungan antarnegara, dimana kawasan Asia menjadi pusat dinamisator perkembangan tersebut. Dalam dimensi ketenagakerjaan globalisasi telah menciptakan kecenderungan atau *trend* sebagai berikut: (1) Meningkatnya arus investasi asing (luar negeri) antar negara bersamaan dengan restrukturisasi, diversifikasi, dan globalisasi industri akan memberikan dampak

²⁵ Simanjuntak, Payaman, 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. LPFEUI. Jakarta

²⁶ Elfindri, 2001. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Penerbit Universitas Andalas. Padang

²⁷ Dikutip oleh Sukardi. *Op Cit*. Hal 261-262

pada struktur tenaga kerja; (2) Perbedaan surplus dan defisit tenaga kerja antarnegara akan menciptakan arus tenaga kerja antarnegara yang potensial akan menghasilkan transfer ketrampilan dan teknologi; (3) Perpindahan tenaga kerja dan *brain drain* akan terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja rendah yang disertai tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tinggi; (4) Negara-negara yang menginjak tahap industrialisasi semakin menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumberdaya manusia sebagai alat strategis untuk menyukseskan dan memenangkan kompetisi.²⁸

2. Perkembangan Angkatan Kerja, Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Menurut teori ekonomi, permintaan tenaga kerja bersifat turunan (*derive demand*), artinya pertumbuhan kesempatan kerja bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan semakin terbuka kesempatan kerja. Selanjutnya bila pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah orang yang memasuki dunia kerja, maka muncullah apa yang disebut dengan pengangguran.

Definisi penganggur terbuka adalah seorang yang termasuk kelompok usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan setengah pengangguran merupakan keadaan seseorang yang telah bekerja, tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini, konsep setengah pengangguran yang digunakan adalah seseorang yang selama periode tertentu bekerja kurang dari jam kerja normal. Jam kerja normal yang ditetapkan adalah selama 35 jam per minggu. Sungguhpun demikian, perlu dicatat bahwa data setengah pengangguran ini hanya merupakan gambaran kasar saja, karena patokannya adalah banyaknya jam kerja per minggu, padahal bisa saja didalamnya terdapat orang-orang yang dengan sukarela bekerja dibawah jam kerja normal, karena tingkat pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan lainnya mereka rasakan sudah cukup memuaskan, sehingga mereka tidak merasa perlu lagi bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama.²⁹

Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 132.759 Ha (1.327,59 Km²) pada tahun 2009 berjumlah 1.593.697 jiwa. Berdasarkan laporan Dinas Sosial,

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*. Hal 270-273

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2009, dari jumlah penduduk sebesar 1.582.619 jiwa tercatat di Kabupaten Banyumas sebanyak 21.618 jiwa sebagai pencari kerja dan belum ditempatkan sebesar 48.929 jiwa. Kelompok angkatan kerja yaitu antara jika dilihat dari kelompok umur pencari kerja produktif pada kelompok 25-29 yakni sebesar 26.150 jiwa atau sekitar 53,44 persen. Dilihat dari tingkat pendidikannya, maka sebagian besar (9.694 jiwa atau 19,81 persen) adalah lulusan setingkat SLTA.³⁰

Berdasarkan data pencari kerja dirinci per pendidikan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010, kembali terlihat bahwa pengangguran terbanyak dari mereka yang lulusan SMU dan SMK serta mereka yang sarjana. Lihat tabel dibawah ini :

Tabel 1. Data Pencari Kerja yang Terdaftar dirinci per Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	2009			2010		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	SD	114	1.173	1.287	100	207	307
2.	SMP	1.297	1.252	2.549	458	1.238	1.696
3.	SMU	1.055	1.521	2.576	1.202	1.536	2.738
4.	SMK	3.116	2.348	5.464	3.597	2.977	6.574
5.	D I	100	50	150	30	52	82
6.	D II	143	213	213	60	125	185
7.	D III	584	1.841	1.841	527	956	1.483
8.	S 1	1.506	2.741	2.741	1.325	1.444	2.769
9.	S 2	17	30	30	18	21	39
	JUMLAH	7.932	8.919	16.851	7.317	8.556	15.873

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, 2010

Adapun di tahun 2010, data dari Dinsosnakertrans menunjukkan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas berdasarkan jenis kelamin; pengangguran dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 72.562 jiwa, sedangkan pengangguran dari jenis kelamin perempuan 62.231 jiwa, total jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas sebanyak 134.793 jiwa.³¹

³⁰BAPPEDA & BPS Kabupaten Banyumas, 2009. *Kabupaten Banyumas dalam Angka, Banyumas in Figures 2008/2009*. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Banyumas dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Banyumas. Hal. 67

³¹ Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Banyumas, Drs. Mardjoko, MM, terkait Situasi Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan di Kabupaten Banyumas 2010.

Angkatan kerja yang berhasil mendapatkan penempatan kerja adalah 3.320 orang. Penempatan tenaga kerja berdasarkan kesempatan kerja yang ada bisa dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 3. Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyumas Tahun 2010

No.	Program Kerja	Jumlah
1.	Antar Kerja Lokal (AKL)	1.450 orang
2.	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	239 orang
3.	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	50 orang
4.	Program Magang Jepang	1.581 orang
	Total	3.320 orang

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, 2010

Hal diatas menarik untuk dicermati berkaitan dengan masalah pengangguran adalah tingkat pendidikan penganggur itu sendiri. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang smakin kecil peluang menganggur. Tapi berdasarkan diatas yang dikumpulkan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas tidak demikian adanya, karena kebanyakan dari penganggur tersebut malahan adalah mereka yang berpendidikan menengah keatas. Hal tersebut mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu, lapangan kerja yang tersedia belum mensyaratkan pendidikan tinggi atau mereka yang berpendidikan tinggi kurang memiliki *skill* yang dibutuhkan dunia kerja, tidak hanya berbekal ijazah.

3. Migrasi (*Emigration and Imigration*)

Selain dengan cara menggenjot pertumbuhan ekonomi terutama pada bidang-bidang yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, pemerintah sebenarnya masih mempunyai cara lain yang dapat ditempuh untuk menanggulangi beban pengangguran yaitu dengan cara pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Upaya ini tidak hanya tepat dilakukan dalam kondisi perekonomian domestik yang sedang dilanda krisis, namun juga perlu dikembangkan ke depan secara lebih terencana dengan cara menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja Indonesia (TKI), pendataan yang akurat, pembekalan pengetahuan dan ketrampilan, serta perlindungan yang memadai. Dengan demikian diharapkan kegiatan ini menjadi solusi sementara dalam bidang ketenagakerjaan, melainkan dapat menjadi sumber pemasukan devisa bagi pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan TKI itu sendiri. Apalagi

dengan terwujudnya era globalisasi, perpindahan penduduk antar negara akan semakin meningkat.³²

Kesempatan bekerja diluar negeri (emigrasi), hal ini cukup menggiurkan karena menjanjikan tingkat penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pendekatan kerja di dalam negeri, sehingga peminatnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran berdasarkan data resmi Dinsosnaker dalam tabel 2 ditampilkan jumlah TKI yang ditempatkan keluar negeri di tahun 2009 – 2010.

Tabel 2. Data Penempatan TKI asal Kabupaten Banyumas

No.	Negara Tujuan	2009	2010	Maret 2011
1.	Saudi Arabia	489	285	137
2.	Singapura	607	356	163
3.	Malaysia	416	279	89
4.	Hongkong	282	239	109
5.	Taiwan	537	422	223
	Jumlah	2.331	1.581	721

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, 2010

Dalam dimensi ketenagakerjaan, perdagangan bebas meningkatkan arus tenaga kerja antara negara yang potensial menghasilkan transfer teknologi dan *brain drain* akan terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja rendah yang disertai tingkat pengangguran dan setengah pengangguran. Bagi sebagian angkatan kerja perubahan-perubahan tersebut merupakan satu peluang untuk dapat berkembang lebih baik; akan tetapi bagi yang lain, terutama mereka yang tidak mempunyai *skill* yang memadai, perubahan tersebut justru menjadi ancaman yang menakutkan.

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS MENGOPTIMALKAN TENAGA KERJA DAN MENINGKATKAN DAYA SAING ANGKATAN KERJA

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan tenaga kerja sebagai bagian dari upaya menyiapkan diri menghadapi *free flow skilled labour* dalam perdagangan bebas ASEAN antara lain :

1. Membangun Sarana dan Prasarana Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja antara lain melalui Balai Latihan Kerja (BLK)

³² *Ibid.* Hal 275

Banyumas yang sejak tahun 2008 sedang dalam tahap persiapan dengan 3 konsentrasi workshop yaitu Otomotif, Tata Laksana Rumah Tangga dan Las (perbengkelan). Kerjasama lebih lanjut juga dilakukan dengan BLK yang telah mapan antara lain dengan BLK Cilacap yang merupakan BLK industri dan BLK Banjarnegara.

2. Membangun hubungan kerjasama dengan pengguna tenaga kerja terutama terkait informasi kesempatan kerja atau lowongan yang tersedia di Kabupaten Banyumas, antara lain dengan AlfaMart atau IndoMart, perusahaan-perusahaan di Banyumas, Purbalingga, Batam dan Kalimantan. Di tahun 2010 tercatat peluang antar kerja lokal sebanyak 3.750 lowongan. Ditengah banyaknya lowongan kerja, seringkali yang menjadi masalah adalah kompetensi pelamar kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada atau ketidaktahuan informasi tentang lowongan kerja tersebut. Oleh karenanya Dinsosnakertrans melakukan sosialisasi langsung ke Kelas 3 SMA / SMK untuk menginformasikan peluang-peluang kerja yang ada.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Saat ini telah terdaftar sekitar 30 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas dan sekitar 100 LPK di Dinas Pendidikan, sedangkan per April 2011 tercatat 31 Bursa Kerja Khusus di Kabupaten Banyumas. Adapun PPTKIS tercatat 42 PPTKIS swasta dan cabang PPTKIS di Kabupaten Banyumas. Di PPTKIS tersebut dilakukan uji kompetensi dan pelatihan bahasa bagi calon-calon tenaga kerja agar siap saat ditempatkan.
4. Melakukan pelatihan-pelatihan secara langsung, antara lain melalui pelatihan pemagangan ke Jepang selama 1 (satu) bulan, pelatihan servis telepon genggam, pelatihan elektronik berkerjasama dengan pemerintah propinsi, pelatihan menjahit, dan pelatihan tata laksana rumah tangga.
5. Program pemberdayaan wirausaha melalui pembinaan, pelatihan dan pemagangan serta fasilitasi bantuan modal melalui dana bergulir atau pinjaman lunak, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh BUMN/BUMD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir. Juga dilakukan peningkatan kemampuan teknologi bagi para Wirausahawan Usaha

Menengah Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui studi banding/pemagangan dan bantuan peralatan kerja.

KESIMPULAN

Globalisasi sebagai proses sosial yang dilandasi oleh berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang sangat cepat telah menjadikan negara seolah-olah tanpa batas dan dunia menjadi sangat terbuka (*borderless*), dalam arti apapun yang terjadi di satu belahan dunia akan dapat diketahui oleh belahan dunia lainnya dalam waktu yang bersamaan sehingga menciptakan konsekuensi percepatan saling ketergantungan antar bangsa. Dalam dimensi ketenagakerjaan, globalisasi meningkatnya arus investasi asing (luar negeri) antar negara akan berdampak pada struktur tenaga kerja seperti meningkatnya arus tenaga kerja antar negara yang potensial menghasilkan transfer ketrampilan dan teknologi dan *brain drain* akan terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah.

Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN sebagai tahapan dari pembentukan *ASEAN Economic Community* dalam menghadapi persaingan bebas global yang merupakan derivasi dari globalisasi tidak hanya mengagendakan pergerakan bebas barang, jasa dan investasi, tapi juga aliran bebas tenaga kerja atau *free flow of skilled labour* yang memicu terjadinya migrasi pekerja dari luar ke negara tersebut atau sebaliknya. Negara yang memiliki sumberdaya manusia yang baik akan mampu berkompetisi menghadapi *free flow of skilled labour* perdagangan bebas ASEAN 2015, sebaliknya negara yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang rendah akan terancam dengan adanya aliran bebas tenaga kerja tersebut. Bagi sebagian angkatan kerja perubahan-perubahan tersebut merupakan satu peluang untuk dapat berkembang lebih baik, akan tetapi bagi yang lain, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai *skill* yang memadai, perubahan tersebut justru menjadi ancaman yang menakutkan.

Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Banyumas saat ini belum memiliki daya tawar dan daya saing yang kuat untuk mampu menghadapi *free flow skilled labour* perdagangan bebas ASEAN 2015. Melihat kondisi yang akan dihadapi sebagai konsekuensi dari globalisasi, Pemerintah kabupaten Banyumas harus menyiapkan secara optimal dan berkelanjutan agar angkatan kerja di kabupaten Banyumas mampu memiliki daya tahan dan daya saing dalam menghadapi era

perdagangan bebas ASEAN yang sudah berjalan agar tidak menjadi pihak yang kalah ditengah arus perdagangan bebas dunia.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut upaya pengembangan sumberdaya manusia perlu terus ditingkatkan melalui berbagai strategi antara lain peningkatan derajat keesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan pendidikan dan pelatihan serta perluasan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat, 2010. *ASEAN Economic Community Scorecard*. "Charting Progress Towards Regional Economic Integration". Publikasi ASEAN Secretariat. Jakarta
- Bank Indonesia, 2008, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. "Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional". Edisi Januari 2008. Bank Indonesia. Jakarta
- BAPPEDA dan BPS Kabupaten Banyumas, 2007. *Kabupaten Banyumas dalam Angka, Banyumas in Figures 2006/2007*. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Banyumas dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
- _____, 2008. *Kabupaten Banyumas dalam Angka, Banyumas in Figures 2007/2008*. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Banyumas dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
- _____, 2009. *Kabupaten Banyumas dalam Angka, Banyumas in Figures 2008/2009*. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Banyumas dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
- Cuyvers, Ludo dan Wisarn Pupphavesa, 1996. *From ASEAN to AFTA*. CAS Discussion Paper No.6. September 1996. Centre for ASEAN Studies - Centre for International Management and Development Antwerp
- Denzin, Norman and Lincoln, Yvonna, 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks Sage Publication. London

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010. *Perkembangan Situasi Ketenagakerjaan Umum di Indonesia 2006-2010*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta
- _____, 2010. *Kondisi Ketenagakerjaan Umum di Indonesia*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, 2011. *Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas 2009 - 2011*. Banyumas
- _____, 2011. *Data Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Cabang PPTKIS Kabupaten Banyumas*. Banyumas
- Elfindri, 2001. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Penerbit Universitas Andalas. Padang
- Gilpin, Robert & Jeans Millis Gilpin, 2002. *Tantangan Kapitalisme Global*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Institute for Global Justice, *ASEAN Watch*, Volume I, No.3, March 2009. "FTA Trapping to Practice Market Liberalization". Institute for Global Justice.
- International Labour Organization, 2007. *Labour and Social Trends in ASEAN 2007: Integration, Challenges, and Opportunities*
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2008. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.02/MEN/III tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Laporan Bupati Kabupaten Banyumas Dr. Mardjoko, MM, tahun 2010 di DPRD Tingkat II Kabupaten Banyumas, *Situasi Tenaga Kerja dan Wirausaha di Kabupaten Banyumas*.
- Luhulima, C.P.F. dkk, 2008. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- McKinsey, A. & Company, 23 Januari 2007. *An ASEAN Economic Community by 2015*. Dipublikasikan oleh ASEAN Secretariat. Jakarta
- Mikic, Mia, 2008. *Free Flow of Services and Skilled Labour in ASEAN*. Laporan penelitian dalam makalah yang disampaikan dalam "Regional Conference on Services Trade Liberalization and Labour Migration Policies in ASEAN : Towards the ASEAN Economic Community". Bangkok 23-26 September 2008. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (United Nations ESCAP)
- Miles, M.B., and Huberman A.M., 1984. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications. California
- Muhadjir, Noeng, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta

- Neuman, Lawrence, 1994. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*,
Third Edition. University of Wisconsin. Boston
- Raharto, Aswatini dkk, 2000. *Kebutuhan Informasi dan Tenaga Kerja Migran Indonesia*. Laporan Penelitian dalam bentuk makalah yang disampaikan pada Seminar Lokakarya LIPI 29-30 Mei 2000. Jakarta,
- Ramlan, 1992. *Metodologi Ilmu Politik*. FISIP Universitas Airlangga. Surabaya
- Saraswati, Veronika, 2009. "ASEAN: Bentuk Regionalisme atau Perpanjangan Empire?". *Global Justice Update*, Tahun ke-6, Edisi 1, Maret 2009. Institute for Global Justice.
- Simanjuntak, Payaman, 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. LPFEUI. Jakarta Surbakti,
- Soesastro, Hadi, 2004. *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi, dan Semua Itu*. CSIS Working Paper Series Maret 2004. Jakarta
- Sugeng, Bambang, 2003. *How AFTA Are You*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Toha, Mahmud (ed.), 2001. *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E – LIPI). Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1996. *Kesiapan Pekerja dalam Peningkatan Kualitas Hasil Industri/Jasa Menghadapi Persaingan Pasar Bebas ASEAN*. EKI Vol. XLIV No.3
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Sutvastie Soemitro, 1998. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia*. PT. Cita Putra Bangsa. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UNDP, 2007, *Human Development Report*. United Nations Development Program.
- World Economic Forum (WEF), 2007, *Global Competitiveness Report*. World Economic Forum. Geneva. Switzerland